

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Bersumber pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan berkaitan dengan kepatuhan pemerintah dan masyarakat dalam hal ini Perwal 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya di kota Bandung dengan fokus Pemeliharaan dan Pemanfaatan bangunan cagar budaya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan masyarakat dan pemerintah, dalam hal pemeliharaan dan pemanfaatan, kesimpulan dari hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Kepatuhan pemilik bangunan cagar budaya terhadap Perwal 921 Tahun 2010 tentang bangunan cagar budaya, adalah tinggi.
2. Tingkat kepatuhan Institusi Pemerintah kota Bandung terhadap Perwal 921 Tahun 2010 tentang bangunan cagar budaya adalah tinggi.
3. Dari 6 faktor yang mempengaruhi kepatuhan seperti yang dikemukakan oleh Weaver, faktor insentif dan sanksi merupakan faktor yang dominan dalam menciptakan kepatuhan baik itu dari pemerintah maupun pemilik bangunan cagar budaya.

4. Faktor pengawasan dan sumber daya menjadi hambatan bagi Institusi Pemerintah Kota Bandung, karena kurangnya SDM dan anggaran. Menjadikan kurangnya kinerja dalam melakukan pengawasan bangunan cagar budaya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka saran peneliti terkait dengan kepatuhan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini bangunan cagar budaya adalah sebagai berikut:

1. Para pemilik/pengelola bangunan cagar budaya, yang merasa bangunan nya sudah dirasa harus diperbaiki, maka cepat untuk diperbaiki tentunya harus berkonsultasi nantinya akan diberi saran dan masukan dari pemerintah, tentunya bagian bangunan yang mana harus diganti dengan yang baru.
2. Pemerintah dalam hal ini Disbudpar kota Bandung, agar bisa memberikan lebih besar insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya, seperti mengurangi jumlah pembayaran PBB, memberikan kemudahan kepada pemilik bangunan cagar budaya untuk melakukan perawatan, lebih banyak memberikan penghargaan kepada pemilik bangunan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi sudah menjaga bangunan cagar budaya.
3. Kepada pemerintah khususnya Disbudpar kota Bandung, agar dapat melakukan pengawasan yang lebih baik, serta meningkatkan jumlah anggota yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan bangunan

cagar budaya, khususnya bangunan cagar budaya yang sudah mengalami kerusakan, baik itu bangunan yang ditinggalkan maupun yang masih ditinggali oleh pemiliknya, kurangnya jumlah sumber daya manusia menjadi kurangnya pengawasan terhadap bangunan cagar budaya di kota Bandung.

4. Pemerintah seharusnya meningkatkan jumlah anggaran untuk Disbudpar kota Bandung, karena jumlah anggaran yang tersedia sekarang masih jauh dari cukup, apalagi Disbudpar kota Bandung harus terus menjaga bangunan cagar budaya, sehingga kecukupan dana anggaran harus terpenuhi, supaya tidak ada lagi bangunan cagar budaya yang terbengkalai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, *Educational Research. Planning conducting and evaluating quantitative and qualitative research* (Pearson Prentice Hall, 2008), dikutip dari Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), Hal 7.

E.A Purwanto, D.R Sulistyastuti, *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya*, (Yogyakarta : GAVA MEDIA, 2015) Hal 43.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hal 112.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang – bidang Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hal 51.

Thomas. R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliff, N.J: Prentice Hall., 1975), 1, dikutip dari B. Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (Yogyakarta: CAPS, 2016) Hal 19.

Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian TanggungJawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Moestopo Beragama, 2014) Hal 3.

Ulber. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Hal 272.

Riant Nugroho , *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003) Hal 16.

Randall B. Ripley & Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, 1986, hlm. 11.*

Studi Dokumen

Peraturan Walikota Bandung No 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya

Website

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1893877/bangunan-bersejarah-smak-dago-dibongkar> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 15.24 WIB

<https://data.go.id/dataset/cagar-budaya> diakses pada tanggal 17/8/2018 pada pukul: 14:53 WIB

<https://news.okezone.com/read/2018/07/24/1/1926797/ridwan-kamil-sesalkan-pembongkaran-bangunan-cagar-budaya> diakses pada tanggal 17 Agustus 2018 pada pukul : 15.24 WIB

<http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=perubahan-cagar-budaya-di-kota-bandung-tak-mengikuti-kaidah-konservasi> diakses pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 9.42 WIB

<http://www.galamedianews.com/bandung-raya/213520/awasi-rencana-perubahan-cagar-budaya-di-kawasan-braga.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pada pukul: 7:55 WIB

<https://ppid.bandung.go.id/profil-kota-bandung/> diakses pada tanggal 19 April 2019 pukul 10.31 WIB

<https://portal.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QR17/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 19 April 2019 pada pukul 10.38 WIB

<https://www.disbudpar.bandung.go.id/profile/organization-structure> diakses pada tanggal 19 April 2019 pada pukul 11.23 WIB

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/04/13/pemerintah-pusat-ikut-mengawasi-pelestarian-cagar-budaya-kota-bandung> diakses pada tanggal 22 April 2019 pada pukul 1:17 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/04/08/ppmt79328-bangunan-cagar-budaya-bandung-diusulkan-keringanan-pbb> diakses pada tanggal 22 April 2019 pada pukul 1:37 WIB

<http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/down.php?id=89&lang=id> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 11.43 WIB

pikiran-rakyat.com/bandung-raja/2018/07/26/sanksi-pidana-untuk-perusak-cagar-budaya-427877 diakses pada tanggal 15 September 2019, pada pukul 11.37 WIB, dijalan Jl. Papandayan (Gatot Subroto no 17), Kota Bandung.

<http://prfmnews.com/berita.php?detail=disbudpar-akui-ada-kekeliruan-pada-pembongkaran-sdn-062-ciujung> diakses pada tanggal 27 November 2019, pukul 1:48 WIB

<https://www.galamedianews.com/bandung-raja/239888/bangunan-sekolah-st-angela-dibongkar-tanpa-izin.html> Diakses pada tanggal 27 November 2019, pukul 14:35 WIB

Jurnal Akademik

A. Aneta, *'Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan P2KP di Kota Gorontalo'* *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2010): 55.

A. L. Rahman, E. S. Astuti, dan M. Saifi, *'Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak: Studi Kasus pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar'* *Jurnal Perpajakan*, 9 (2016): 3.

A. Misna, *'Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur'* *Jurnal Administrasi Negara*, 3 (2015): 527.

H. Akib, *'Implementasi Kebijakan: Apa Mengapa dan Bagaimana'* *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2010): 2.

J. P. Lester dan J. Stewart Jr, *Public Policy: An Evolutionary Approach*, (Wadsworth: Cengage Learning, 2004), 4.

S. Prastyanti, *'Pendekatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan'* *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11 (2015): 107.

Kent Weaver (2009). *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*.

OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) *Reducing the risk of policy failure : challenges for regulatory compliance*, 2000. Hal 7

R. Kent Weaver. 2009. *Target Compliance: the Final Frontier of Policy Implementation* hal 5, dirubah oleh peneliti sesuai dengan topik penelitian.

LAMPIRAN

Lampiran I : Pertanyaan Penelitian